

<https://www.uu.nl/en/in-the-media/israel-is-at-war-with-hamas-what-happened-and-what-will-happen-next>

KONFLIK PALESTINA – ISRAEL

Perang Gaza antara Israel dan Hamas didahului oleh konflik yang telah berlangsung selama lebih dari seratus tahun. Konflik ini kemudian dikenal sebagai konflik Israel-Palestina. Tanpa konteks sejarah ini, Perang Gaza saat ini tidak dapat dipahami. Melalui limimasa, lima cendekiawan menjelaskan sejarah dan latar belakang konflik Israel-Palestina, langkah demi langkah dan berdasarkan keahlian mereka masing-masing.

Sejarah dan Latar Belakang

Inti dari konflik Israel-Palestina adalah hak untuk menentukan nasib sendiri. Baik Zionis Yahudi maupun Arab Palestina mengklaim hak historis dan/atau agama atas negara mereka sendiri di wilayah Palestina. Dalam limimasa ini, yang didasarkan pada limimasa yang digunakan para cendekiawan dalam mempelajari konflik Israel-Palestina, lima pakar menjelaskan dasar sejarah dan latar belakang konflik tersebut.

Pertemuan Awal (c. 1880-1917)

1897: Kongres Zionis Pertama di Basel

Theodor Herzl (1860-1904) adalah pendiri gerakan Zionis. Pada 3 September 1897, ia menulis dalam buku harianya: "Jika saya harus meringkas Kongres di Basel dalam satu kata (...) maka itu adalah: di Basel, saya telah mendirikan Negara Yahudi. Jika saya mengatakan ini dengan lantang hari ini, saya akan disambut dengan ejekan universal. Tetapi mungkin dalam lima tahun dari sekarang, tetapi pasti lima puluh tahun, semua orang akan melihatnya."

1915-1917: Tiga Perjanjian Inggris yang Bertentangan

Selama Perang Dunia I (1914-1918), di Timur Tengah, Britania Raya dan Prancis berhadapan dengan Kesultanan Utsmaniyah, yang berpihak pada Jerman dan Austria-Hongaria. Untuk mengalahkan Utsmaniyah, sekaligus memajukan kepentingan mereka sendiri di wilayah tersebut, Inggris mencapai tiga perjanjian yang bertentangan dengan tiga pihak yang berbeda pada waktu yang hampir bersamaan. Ketiga perjanjian ini memiliki pengaruh yang kuat terhadap masa depan Timur Tengah dan Palestina.

Mandat Inggris (1917-1939)

1917: Deklarasi Balfour

Pada tanggal 2 November 1917, Menteri Luar Negeri Inggris, Arthur Balfour (1848-1930), mendeklarasikan bahwa Britania Raya akan mempromosikan 'Rumah Yahudi Nasional' di Palestina setelah Perang Dunia I. Cita-cita luhur tidak begitu penting dalam hal ini – terlebih lagi kepentingan politik.

Bagi Inggris, prioritas utama adalah memastikan bahwa Perdana Menteri Soviet Vladimir Lenin (1870-1924) akan melanjutkan perang melawan Jerman setelah Revolusi Komunis 1917. Dengan pengumuman pembangunan rumah bagi kaum Yahudi di Palestina, Balfour berharap kaum Yahudi

komunis yang berpengaruh dapat meyakinkan Lenin untuk melakukannya. Balfour juga berharap hal ini akan mendorong kelompok-kelompok lobi Yahudi di Washington untuk mendesak Presiden Amerika Woodrow Wilson (1856-1924) agar mengirimkan lebih banyak pasukan Amerika ke medan perang di Flanders dan Prancis Utara, dan melakukannya dengan lebih cepat. Namun, Balfour terlalu melebih-lebihkan pengaruh Yahudi dalam proses pengambilan keputusan politik.

Selain itu, janji pembangunan rumah bagi kaum Yahudi di Palestina memberikan alasan yang sah bagi Inggris Raya untuk mengambil alih wilayah yang strategis ini dari Kesultanan Utsmaniyah setelah perang. Inggris menyadari bahwa diperlukan alasan yang sah untuk meyakinkan Amerika tentang perluasan baru Kekaisaran Kolonial Inggris.

Kekecewaan di kalangan Yahudi Zionis dan Palestina

Setelah Perang Dunia I, Liga Bangsa-Bangsa, pendahulu Perserikatan Bangsa-Bangsa, menetapkan Palestina sebagai mandat yang dikelola oleh Inggris, yang kemudian memerintahnya sebagai koloni. Hal itu tidak mudah. Yahudi Zionis kecewa karena tanah air Yahudi yang dijanjikan tidak diizinkan menjadi negara merdeka. Dan terjadi agitasi di antara penduduk asli Arab yang pada akhirnya akan memicu Pemberontakan Palestina.- Peter Malcontent

1929-1939: Pemberontakan Palestina dan Komisi Peel

Pada tahun 1920-an dan 1930-an, emigrasi Zionis ke Palestina terus berlanjut sementara perlawanan terhadapnya terus meningkat di antara penduduk setempat. Hal ini seringkali memicu kekerasan, seperti pada tahun 1929, ketika kerusuhan meletus memperebutkan hak atas Tembok Barat di Yerusalem. Orang-orang Arab menyerang sebagian besar orang Yahudi non-Zionis di Yerusalem dan Hebron, setelah itu Zionis menargetkan orang-orang Arab di berbagai tempat. Dalam hal ini, dan dalam upaya Inggris untuk mendapatkan kembali kendali atas situasi, sekitar 250 orang Yahudi dan Arab tewas.

Dari Shoah hingga Nakba (sekitar 1939-1949)

1939-1948: Shoah dan imigrasi Yahudi ke Palestina

Holocaust, atau Shoah, adalah pembunuhan struktural dan sistematis terhadap sekitar enam juta orang Yahudi Eropa yang dipimpin oleh Nazi Jerman selama Perang Dunia Kedua (1939-1945). Setelah perang, dunia menyaksikan salah satu krisis pengungsi terbesar yang pernah ada: diperkirakan sepuluh juta orang Eropa mengungsi.

Banyak dari mereka kembali ke negara asal, tetapi sejumlah besar pengungsi tidak memiliki rumah untuk kembali. Di antara mereka terdapat banyak orang Yahudi Eropa, dengan sedikit atau tanpa kerabat yang masih hidup, yang tidak dapat atau tidak ingin kembali ke tempat-tempat di mana tetangga non-Yahudi mereka lebih suka melihat mereka pergi hingga baru-baru ini. Mereka ditempatkan di kamp-kamp di Jerman, Austria, dan Italia, terkadang dipaksa tinggal di sana selama bertahun-tahun.

Ironisnya, kamp-kamp ini sangat penting bagi kampanye humas Zionis. Gambar-gambarnya beredar di dunia dan David Ben-Gurion (1886-1973), calon Perdana Menteri Israel pertama, mengunjungi kamp-kamp tersebut untuk meyakinkan orang-orang Yahudi di sana bahwa masa depan mereka ada di Palestina. Hal ini kontroversial karena Inggris, yang masih memegang mandat, telah membatasi imigrasi ke Palestina secara ketat. Melalui jalur bawah tanah Brichah ('Pelarian'), orang-orang Yahudi tetap pindah ke Palestina.

Dukungan internasional yang lebih besar untuk negara Yahudi

Pada tahun 1947, Penjaga Pantai Inggris dengan kekerasan mengirim kapal Exodus, yang ditumpangi banyak penyintas Holocaust untuk mencapai Palestina, kembali ke laut. Peristiwa Eksodus ini memicu kengerian di seluruh dunia, dan semakin memperkuat niat baik kaum Zionis.

Selain orang Yahudi, politisi non-Yahudi, yang sebelumnya seringkali tidak menganggap proyek Zionis layak, juga menjadi yakin bahwa dukungan kepada kaum Zionis dapat dibenarkan secara moral. Sejumlah besar pengungsi Yahudi akhirnya datang ke Palestina (dan ke Negara Israel setelah Mei 1948), meskipun sejumlah besar juga beremigrasi ke Amerika Serikat, Kanada, Australia, Amerika Latin, dan belahan dunia lainnya.

Pendirian negara Yahudi Israel yang berdaulat

Bencana dahsyat Holocaust bagi kaum Yahudi Eropa selama Perang Dunia II memiliki pengaruh yang menentukan terhadap pendirian negara Yahudi pada tahun 1948. Pada Oktober 1944, Badan Yahudi untuk Israel, yang dibentuk pada Kongres Zionis ke-16 di Zürich pada tahun 1929, telah menyatakan kepada pemerintah Inggris bahwa tujuan politiknya adalah mengubah Palestina menjadi Persemakmuran Yahudi pada akhir perang. Para pemimpin Badan Yahudi, termasuk tokoh-tokoh seperti David Ben-Gurion, berupaya memanfaatkan lanskap geopolitik pascaperang untuk mencapai tujuan nasional mereka.

Badan Yahudi membayangkan sebuah negara Yahudi yang berdaulat, yang terutama setelah Holocaust, akan berfungsi sebagai tempat berlindung yang aman bagi kaum Yahudi di seluruh dunia. Pada Oktober 1945, para pembuat kebijakan Inggris sepakat untuk membentuk Komite Penyelidikan Anglo-Amerika (AACI). Yang meresahkan perwakilan Arab dan Palestina, AACI secara eksplisit dan sengaja mengaitkan, alih-alih memisahkan, isu-isu yang berkaitan dengan penyintas Holocaust dan masa depan Palestina. Laporan tersebut secara khusus menganjurkan, baik atas dasar kemanusiaan maupun politik, penerimaan segera 100.000 penyintas Yahudi ke Palestina dan membayangkan sebuah negara kesatuan di Palestina berdasarkan prinsip-prinsip non-dominasi dan binasionalisme (satu negara di mana orang Yahudi dan Arab hidup berdampingan).

1947: Rencana Pembagian Palestina oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa

Lelah setelah Perang Dunia II dan hampir bangkrut, Britania Raya merasa tidak lagi mampu menjaga ketertiban di Palestina. Terutama karena ketegangan semakin meningkat. Di satu sisi, kaum Zionis Yahudi bangkit melawan kekuasaan Inggris karena Britania Raya ingin membatasi imigrasi para penyintas Holocaust. Di sisi lain, warga Arab Palestina merasa Inggris membiarkan terlalu banyak migran menetap. Pada tahun 1947, Inggris meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang baru didirikan untuk menyuarakan pendapat mereka tentang masa depan Palestina. Komite Khusus Palestina (UNSCOP) mengajukan proposal yang diperdebatkan.

UNSCOP menyarankan pembagian Palestina menjadi negara Yahudi dan negara Palestina, sebuah rencana yang didukung oleh mayoritas Majelis Umum.

Negara Yahudi dan Negara Palestina

Namun, masih belum jelas bagaimana solusi dua negara ini akan diwujudkan. Zionis Yahudi dapat menerima usulan UNSCOP, tetapi tidak demikian halnya bagi warga Arab Palestina dan negara-negara Arab di sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh rencana pembagian yang mengalokasikan lebih dari separuh wilayah Palestina kepada Zionis, sementara populasi Arab Palestina dua kali lipat jumlah mereka.

Dewan Keamanan PBB tidak bersedia memaksakan rencana pembagian tersebut. Akibatnya, perang saudara dan perang regional terjadi setelah deklarasi kemerdekaan Israel pada tahun 1948.

1948: Deklarasi Kemerdekaan Israel

Pada tengah malam tanggal 15 Mei 1948, mandat yang diberikan oleh Liga Bangsa-Bangsa kepada Britania Raya pada tahun 1920 berakhir. Sehari sebelumnya, Badan Yahudi dari Organisasi Zionis Dunia telah mendeklarasikan Israel merdeka. David Ben-Gurion (1886-1973) adalah orang pertama yang menandatangani deklarasi tersebut dan menjadi Perdana Menteri pertama Israel. Namun hingga saat-saat terakhir, berbagai pihak Zionis masih bernegosiasi mengenai berbagai aspek negara baru yang akan dibentuk tersebut.

1947-1949: Nakba Palestina dan Perang Arab-Israel Pertama

Hampir segera setelah deklarasi kemerdekaan Israel, negara-negara Arab di sekitarnya menginvansi Israel. Dalam Perang Arab-Israel Pertama (1948) ini, pasukan dari negara-negara tetangga Mesir, Yordania, Suriah, Irak, dan Lebanon, serta milisi Palestina setempat, menyerbu negara yang baru dideklarasikan tersebut, dengan tujuan mencegah berdirinya negara Yahudi dan mencegah pengungsian lebih lanjut warga Arab Palestina. Perang tersebut memiliki konsekuensi kemanusiaan yang sangat besar, yang masih terasa hingga saat ini.

Pengungsi

Menurut perkiraan konservatif, lebih dari 750.000 warga Palestina diusir ke negara-negara tetangga, tempat mereka ditempatkan di kamp-kamp pengungsi. Hukum dan peraturan Israel yang semakin keras membuat banyak dari mereka mustahil untuk kembali. Pengusiran yang seringkali disertai kekerasan ini, ditambah dengan perampasan tanah dan penganiayaan, disebut **Nakba ('bencana'** atau **'malapetaka'**) dalam konteks Palestina. Selain itu, penduduk Arab yang tersisa kini telah menjadi minoritas Palestina dengan, seperti yang kemudian terjadi, status kelas dua di Israel.

Banyak komunitas Yahudi di negara-negara dengan mayoritas Arab juga dianiaya dan diusir, yang menyebabkan mereka dimukimkan kembali di Israel, yang mengakibatkan tekanan yang semakin besar akibat pertumbuhan populasi di wilayah tersebut.

Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa 194

Bermaksud untuk mencapai solusi perang, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa menerima Resolusi 194 pada tahun 1948. Salah satu pasal terpentingnya menyatakan bahwa pengungsi Palestina diizinkan untuk pulang. Mereka yang memilih untuk tidak pulang akan menerima kompensasi. Israel tidak setuju dan menolak resolusi tersebut.

Perang Arab-Israel Pertama berakhir dengan serangkaian gencatan senjata (gencatan senjata, bukan perjanjian damai). Pasukan Israel berhasil menangkis invasi Arab dan bahkan memperluas wilayah mereka melampaui batas-batas yang diusulkan oleh Rencana Pembagian PBB tahun 1947, yang membuka jalan bagi konflik-konflik berikutnya.

Regionalisasi konflik (1956-1973)

1956: Krisis Suez (Perang Arab-Israel Kedua)

Krisis Suez 1956 (atau Perang Arab-Israel Kedua) terjadi antara Israel, Mesir, Britania Raya, dan Prancis. Konflik ini berakar pada jaringan ketegangan regional dan kepentingan geopolitik yang kompleks, dan konsekuensinya tak terduga dan berdampak luas.

Pada tahun 1952, setelah Perang Arab-Israel Pertama, Jenderal Abdel Nasser (1918-1970) merebut kekuasaan dan mengangkat dirinya sendiri sebagai presiden Mesir. Ia segera memulai kampanye modernisasi. Ketika Amerika Serikat menolak membiayai Bendungan Aswan, sebagian karena hubungan Nasser dengan Tiongkok komunis dan Soviet, ia memutuskan untuk menasionalisasi Terusan Suez pada Juli 1956. Sejak abad ke-19, jalur air vital yang menghubungkan Laut Mediterania dengan Laut Merah ini dibiayai dan dikendalikan oleh Inggris dan Prancis.

Kolusi Israel-Inggris-Prancis

Inggris Raya dan Prancis marah dengan nasionalisasi yang dilakukan Nasser, dan Perang Arab-Israel Kedua dimulai setelah sebuah perjanjian rahasia ditandatangani antara mereka dan Israel. Israel akan menginvasi Mesir, dan kemudian, dengan dalih menjadi pasukan penjaga perdamaian, Inggris dan Prancis akan mengerahkan pasukan mereka untuk menghentikan pertempuran dan merebut kembali kendali Terusan Suez untuk 'melindunginya'.

Kolusi Israel-Inggris-Prancis mengejutkan komunitas internasional dan menuai kecaman dari Amerika Serikat dan Uni Soviet. Amerika Serikat, yang khawatir akan eskalasi dan meluasnya pengaruh Soviet di Timur Tengah, menekan Inggris dan Prancis untuk menarik pasukan mereka. Meskipun berhasil meraih kemenangan militer, Inggris dan Prancis mundur dengan rasa malu, sementara Israel juga terpaksa mundur.

Nasser mengubah kekalahan militer menjadi kemenangan politik dan popularitasnya melonjak di seluruh Timur Tengah. Perang tersebut memiliki konsekuensi yang luas karena mempercepat proses dekolonialisasi di Afrika dan Timur Tengah, mendorong Uni Soviet untuk menginvasi Hongaria, dan membuka jalan bagi konflik di masa depan antara Israel dan negara-negara tetangganya.

1964: Pembentukan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO)

Dalam upaya untuk menyatukan kekuatan, Liga Arab mendirikan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) pada tahun 1964. PLO memiliki Dewan Nasional (parlemen), Dewan Eksekutif (pemerintah), Piagam Nasional, angkatan bersenjata (dengan unit-unit yang tergabung dalam berbagai angkatan bersenjata Arab), dan seorang Ketua, diplomat Palestina Ahmad al-Shuqayri (1908-1980). Dengan demikian, PLO benar-benar menjadi negara Palestina di pengasingan.

Nasionalisme Palestina

Selama Perang Arab-Israel Pertama tahun 1948, isu pengungsi Palestina mencuat. Para pengungsi ini sebagian besar berakhir di kamp-kamp pengungsian, tempat identitas nasional Palestina yang jelas dan kuat berkembang. Berbagai kelompok militer juga didirikan di sana pada tahun 1950-an, di antaranya Gerakan Pembebasan Nasional Palestina (Fatah) yang paling terkenal. Organisasi-organisasi ini melancarkan serangan terhadap Israel dengan dukungan dari negara-negara Arab, tetapi tetap berfungsi sebagai entitas otonom. Pada saat yang sama, semakin sedikit warga Palestina yang percaya bahwa negara-negara Arab akan mampu merebut kembali tanah mereka yang hilang.

PLO Memperoleh Karakter yang Lebih Palestina

Dalam konteks ini, negara-negara Arab mendirikan PLO pada tahun 1964. Namun, kelompok-kelompok militer yang terbentuk di kamp-kamp pengungsian menjauh dari PLO, karena mereka percaya bahwa PLO bersifat Arab dan bukan Palestina. Hal ini berubah ketika negara-negara Arab kalah dalam perang melawan Israel tahun 1967. Al-Shuqayri digantikan sebagai Ketua oleh aktivis dan pengacara Palestina Yahya Hammuda (1909-2006). Setahun kemudian, organisasi tersebut menyempurnakan Piagam Nasional dan dokumen tersebut menerima karakter yang lebih Palestina.

Dengan pemilihan Dewan Nasional Palestina kelima, kelompok-kelompok militer memperoleh mayoritas kursi dan memilih pemimpin Fatah Yasser Arafat (1929-2004) sebagai Ketua pada tahun 1969. Sejak saat itu, PLO menjadi organisasi payung Palestina yang sesungguhnya bagi berbagai kelompok dan tetap demikian hingga saat ini.

1967: Perang Arab-Israel Ketiga (Perang Enam Hari)

Sebelum Perang Arab-Israel Ketiga (juga dikenal sebagai Perang Enam Hari), ketegangan antara Israel dan negara-negara tetangga Arabnya telah meningkat selama bertahun-tahun. Penggerahan pasukan militer dan provokasi di sepanjang perbatasan Israel, terutama dengan Mesir di Semenanjung Sinai, terbukti menjadi pemicu langsung perang ini – perang yang secara radikal mengubah wajah Timur Tengah dalam enam hari.

Akibat penumpukan kekuatan tersebut, pada 5 Juni 1967, Israel melancarkan serangan pendahuluan terhadap Mesir, Yordania, dan Suriah, yang menargetkan angkatan udara dan infrastruktur militer mereka untuk menetralisir ancaman yang ditimbulkan oleh pasukan Arab. Pasukan Israel dengan cepat mencapai superioritas udara dan meraih keuntungan teritorial yang signifikan, menggunakan taktik militer inovatif yang kini dikenal sebagai 'operasi senjata gabungan'. Dengan memanfaatkan koordinasi tingkat tinggi antara unit darat, udara, dan artilleri, Pasukan Pertahanan Israel juga merebut Semenanjung Sinai dan Jalur Gaza dari Mesir, Tepi Barat dari Yordania (termasuk Yerusalem Timur), dan Dataran Tinggi Golan dari Suriah.

Israel Memenangkan Perang

Pada 10 Juni, Perang Enam Hari menghasilkan kemenangan bagi Israel, mengamankan eksistensinya dan memperluas wilayahnya secara signifikan. Namun, keuntungan ini harus dibayar mahal, dengan implikasi yang mendalam bagi konflik Israel-Palestina dan hubungan Arab-Israel.

Israel kembali melampaui batas wilayahnya pada tahun 1948, yang menyebabkan eksodus massal pengungsi Palestina dan semakin memperburuk ketegangan antara Israel dan dunia Arab. Israel muncul sebagai kekuatan di Timur Tengah, sementara pendudukannya atas wilayah-wilayah yang direbutnya tetap menjadi hambatan signifikan bagi perdamaian di kawasan tersebut.

Gencatan senjata disepakati dengan semua pihak pada 10 Oktober 1967, tetapi perdamaian tidak bertahan lama. Militer Mesir belajar dari kekalahan ketiga berturut-turut ini dan mengubah cara mereka melatih dan mempromosikan perwira. Perubahan ini berdampak besar pada dekade berikutnya.

1967: Resolusi PBB 242 tentang penarikan mundur Israel dari wilayah pendudukan

Komunitas internasional merespons dengan tegas Perang Arab-Israel Ketiga dan arus pengungsi Palestina yang semakin besar. Pada 22 November 1967, Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan suara bulat mengadopsi Resolusi 242. Dalam resolusi ini, PBB menyatakan bahwa perolehan wilayah melalui perang 'tidak dapat diterima' dan dewan memerintahkan Israel untuk segera mundur dari wilayah yang didudukinya selama Perang Enam Hari. Menurut dewan, hal ini sangat penting untuk mencapai perdamaian jangka panjang. Perang 1967 mengembalikan masalah Palestina ke dalam agenda politik internasional, tetapi Israel menolak Resolusi Dewan Keamanan PBB 242 ini.

Pendudukan Militer Gaza dan Tepi Barat

Gaza dan Tepi Barat, wilayah yang masing-masing merupakan wilayah Yordania dan Mesir sebelum perang 1967, secara tradisional merupakan rumah bagi banyak warga Palestina. Terutama akibat

Nakba, jumlah tersebut semakin bertambah. Hal ini membuat aneksasi penuh Gaza dan Tepi Barat setelah perang bukanlah pilihan bagi Israel. Semua penduduk kemudian harus diberikan kewarganegaraan Israel, yang akan merusak identitas negara Yahudi Israel.

Israel memutuskan pendudukan militer jangka panjang yang memungkinkannya membatasi hak-hak politik dan sipil warga Palestina. Di masa ketika hak asasi manusia internasional semakin penting, hal ini tidak diterima dengan baik oleh Amerika Serikat dan Eropa. Hal ini menyebabkan sekutu-sekutu utama Israel ini sedikit meningkatkan dukungan mereka terhadap hak-hak Palestina untuk menentukan nasib sendiri.

1973: Perang Yom Kippur (Perang Arab-Israel Keempat)

Ketegangan di kawasan tersebut tinggi akibat masalah yang belum terselesaikan dari konflik sebelumnya. Pada tahun 1973, hal ini memicu Perang Yom Kippur (atau Perang Oktober, Perang Ramadan, atau Perang Arab-Israel Keempat). Mesir dan Suriah berusaha merebut kembali wilayah yang direbut dan menantang superioritas militer Israel. Dan kali ini, pasukan Israel tidak siap menghadapi konflik.

Perang dimulai pada 6 Oktober 1973, yang merupakan hari suci umat Yahudi, Yom Kippur, dan salah satu hari di bulan suci Ramadan. Mesir dan Suriah melancarkan serangan mendadak terhadap pasukan Israel di Semenanjung Sinai dan Dataran Tinggi Golan. Pada awal perang, pasukan Mesir dan Suriah mencapai perolehan teritorial yang signifikan, dengan pasukan Mesir menyeberangi Terusan Suez dan pasukan Suriah maju ke Dataran Tinggi Golan.

Israel Mempertahankan Kendali atas Wilayah yang Direbut

Meskipun mengalami kemunduran di awal, Israel dengan cepat memobilisasi pasukannya dan melancarkan serangan balasan. Pasukan Israel menyeberangi Terusan Suez menuju Mesir dan memukul mundur pasukan Suriah di Dataran Tinggi Golan. Setelah tiga minggu pertempuran sengit, gencatan senjata yang ditengahi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai berlaku pada 25 Oktober 1973. Perang berakhir dengan banyak korban di semua pihak dan Israel tetap mempertahankan kendali atas wilayah yang telah direbutnya dalam konflik sebelumnya.

Perang Yom Kippur memicu keterlibatan internasional yang signifikan, dengan Amerika Serikat dan Uni Soviet sama-sama memainkan peran diplomatik untuk mencoba mengakhiri konflik tersebut. Amerika Serikat juga memberikan bantuan militer kepada Israel, sementara Uni Soviet mendukung negara-negara Arab secara militer. Perang tersebut menyebabkan perubahan signifikan dalam politik regional, mungkin yang paling signifikan adalah perubahan kebijakan Mesir. Presiden Anwar Sadat (1918-1981), yang mengorbankan posisi Mesir sebagai kekuatan Arab terkemuka di Timur Tengah, memutuskan untuk mengubah orientasi kebijakan Mesir demi hubungan yang lebih erat dengan Amerika Serikat, dan akhirnya, menuju perdamaian dengan Israel.

Nasionalisme Palestina dan Intifada Pertama (sekitar 1978-1987)

1978-1979: Perjanjian Camp David (Camp David I)

Perang Yom Kippur, dengan kemunduran awal dan kerugian besar bagi Israel, diikuti oleh intensifikasi upaya diplomatik internasional. Di bawah kepemimpinan Menteri Luar Negeri Henry Kissinger (1923-2023), Amerika Serikat muncul sebagai mediator utama dalam fase ini, sehingga secara tegas menyingkirkan Uni Soviet dari perannya dalam Proses Perdamaian Timur Tengah.

Upaya diplomatik tersebut terwujud dalam perjanjian yang dikenal sebagai Perjanjian Camp David, yang secara spesifik terdiri dari dua dokumen: 'Kerangka Kerja untuk Perdamaian di Timur Tengah' dan

‘Kerangka Kerja untuk Penyelesaian Perjanjian Damai antara Mesir dan Israel’. Hanya ‘Kerangka Kerja’ kedua yang menghasilkan perjanjian damai formal dalam upacara penandatanganan yang ikonis di halaman Gedung Putih pada 26 Maret 1979.

Palestina Tidak Hadir

Penandatanganan tersebut diiringi protes dari para pendukung Palestina di luar gedung. Palestina, yang saat itu diwakili oleh Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), telah dikecualikan dari negosiasi yang mengarah ke Camp David I. Banyak pemimpin Arab mengecam upaya Presiden Mesir Anwar Sadat (1918-1981) untuk mencapai ‘perdamaian terpisah’ di Camp David I, yang menandai terputusnya isu Palestina dari hubungan Arab-Israel yang lebih luas.

1982 (dan 2006): Perang Lebanon

Perang Lebanon 1982 (Perang Lebanon Pertama) adalah konflik antara Israel dan berbagai kelompok militer Palestina serta faksi-faksi Lebanon. Israel bertujuan untuk mengusir pasukan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) dari Lebanon selatan, karena PLO menggunakan wilayah ini sebagai pangkalan untuk menyerang Israel.

Pemicu konflik ini adalah upaya pembunuhan Shlomo Argov (1929-2003), duta besar Israel untuk Britania Raya, oleh sebuah organisasi militer Palestina. Israel merespons dengan melancarkan kampanye militer ke Lebanon, yang dengan cepat bergerak maju ke dalam wilayah Lebanon.

Kehadiran Militer Israel di Lebanon

Perang tersebut memiliki konsekuensi yang signifikan, termasuk pengepungan Beirut, yang mengakibatkan banyaknya korban sipil dan kerusakan infrastruktur yang parah. Meskipun Israel mencapai tujuan awalnya untuk mengusir pasukan PLO dari Lebanon selatan, perang tersebut pada akhirnya mengakibatkan kehadiran militer Israel yang berkepanjangan di Lebanon (1982-1985) dan semakin memperburuk ketidakstabilan di wilayah tersebut. Hal ini juga berkontribusi pada munculnya Hizbullah, sebuah kelompok militer Syiah, yang kemudian menjadi kekuatan penting dalam politik Lebanon dan, hingga saat ini, menjadi musuh Israel.

Perang Lebanon Kedua

Konflik tersebut kembali meletus pada tahun 2006, dalam Perang Lebanon Kedua. Bentrokan ini dipicu oleh serangan lintas batas oleh Hizbullah, di mana kelompok tersebut menangkap dua tentara Israel dan menewaskan tiga lainnya. Israel merespons dengan operasi militer skala besar yang bertujuan melemahkan Hizbullah dan mencegah serangan lebih lanjut. Konflik tersebut dengan cepat meningkat menjadi perang skala penuh.

Hizbullah membalas dengan meluncurkan roket ke Israel utara, yang menargetkan wilayah sipil. Konflik tersebut mengakibatkan korban jiwa yang signifikan di kedua belah pihak, dengan ratusan warga sipil dan militer Lebanon tewas, serta puluhan tentara dan warga sipil Israel. Perang tersebut berlangsung selama 34 hari sebelum gencatan senjata yang ditengahi oleh Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa mulai berlaku pada 14 Agustus 2006.

1987-1993: Intifada Pertama dan berdirinya Hamas

Pada 1980-an, perhatian terhadap konflik Israel-Palestina menurun, baik di Israel maupun dunia Arab, serta di komunitas internasional. Pada 1987, konflik ini berakhir tiba-tiba ketika seorang pengemudi Israel menewaskan empat warga Palestina di Jalur Gaza. Konflik meningkat dan Palestina memulai pemberontakan yang berlangsung selama bertahun-tahun: Intifada Pertama.

Israel dan wilayah Palestina yang diduduki

Alasan mendasar pemberontakan ini adalah pendudukan Israel, yang dimulai pada tahun 1967 dan diwujudkan dalam pembangunan permukiman dan penindasan terhadap penduduk Palestina.

Layaknya pemerintah Israel, para pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) terkejut dengan pemberontakan tersebut. Mereka telah terisolasi secara politik dan diplomatik di Tunis sejak Perang Lebanon Pertama. Di ibu kota Tunisia, mereka jauh dari wilayah pendudukan Israel.

PLO dan Hamas

Sementara Palestina melawan militer Israel dengan cara-cara yang sebagian besar non-militer dan membangun budaya kepemimpinan dan pemerintahan mereka sendiri di wilayah pendudukan, PLO mencoba mengendalikan pemberontakan dengan memanfaatkan orang-orang yang sepaham untuk memandu kemajuannya. Namun, Israel semakin mengendalikan Intifada, yang hanya menghasilkan keberhasilan parsial. Selain itu, PLO harus berhadapan dengan organisasi pesaing baru selama periode ini, karena pada tahun 1987, Hamas didirikan.

Proses Perdamaian, atau kegagalannya (1991-2000)

1991: Konferensi Perdamaian Madrid

Benih-benih yang ditanam melalui Perjanjian Camp David tahun 1978 akhirnya membawa hasil pada Konferensi Madrid tahun 1991, di mana negara-negara Arab lainnya dan perwakilan Palestina bergabung dalam proses perdamaian. Sebuah pertemuan bersejarah dimulai pada 30 Oktober 1991, di Istana Kerajaan Madrid, menandai dimulainya kembali tabu-tabu yang telah lama berlaku.

Kehadiran Palestina

Menteri Luar Negeri AS James Baker (1930-) kini menelusuri kembali jalur diplomatik yang dijalankan oleh Henry Kissinger (1923-2023) pada tahun 1970-an. Untuk memfasilitasi partisipasi Palestina, pengaturan khusus harus dirancang. Perdana Menteri Israel Yitzhak Shamir (1915-2012) menolak bertemu dengan perwakilan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO), sementara Palestina bersikeras mendapatkan persetujuan diam-diam dari kantor pusat PLO di Tunis sebelum berpartisipasi. Salah satu pengaturan tersebut adalah secara resmi memasukkan Palestina ke dalam delegasi Yordania.

Tidak Ada Terobosan Konflik Israel-Palestina

Meskipun telah berdiskusi selama beberapa hari, para delegasi meninggalkan Madrid tanpa terobosan signifikan, kecuali dua tonggak simbolis: bersatunya kembali setelah tabu lama tentang interaksi langsung antara Palestina dan Israel, dan penetapan protokol untuk perundingan selanjutnya di tempat lain. Baru pada tahun 1993, dengan inisiatif non-konvensional oleh para pemimpin senior PLO dan Israel di Oslo, terobosan substantif terjadi.

1993-1995: Perjanjian Oslo (gagal)

Pada 13 September 1993, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin (1922-1995) dan pemimpin Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) Yasser Arafat (1929-2004) menandatangani apa yang disebut Perjanjian Oslo. Perjanjian ini merupakan hasil negosiasi rahasia di ibu kota Norwegia, Oslo, dan didasarkan pada prinsip 'tanah ditukar dengan perdamaian'.

Mengakui Israel dan Otonomi Palestina

Perjanjian Oslo didasarkan pada prinsip 'tanah ditukar dengan perdamaian'. Arafat mengakui Negara Israel dan Rabin menjanjikan otonomi Palestina di Gaza dan Tepi Barat. Pada tahun 1995, mereka sepakat bahwa PLO akan diberikan administrasi sementara atas Gaza dan sebagian wilayah Tepi Barat. Tujuh puluh persen wilayah Tepi Barat lainnya tetap berada di tangan Israel untuk sementara waktu.

Solusi dua negara?

Jadi, meskipun komunitas internasional memiliki harapan yang tinggi, solusi dua negara – negara Palestina merdeka yang berbatasan dengan Israel – belum terlihat. Sejumlah isu kontroversial harus diselesaikan terlebih dahulu, seperti masalah perluasan permukiman Yahudi di wilayah Palestina, status masa depan Yerusalem, dan hak pengungsi Palestina untuk kembali.

Popularitas PLO yang Menurun

Banyak warga Palestina yang kurang percaya pada proses negosiasi, tetapi Arafat tidak punya pilihan. Pada tahun 1990, ia kehilangan kepercayaan dari Amerika Serikat dan banyak negara Arab karena mendukung diktator Irak Saddam Hussein (1937-2006) dalam invasinya ke Kuwait. Popularitas Arafat juga menurun di kalangan penduduk Palestina. Intifada bukan hanya protes terhadap pendudukan Israel, tetapi juga terhadap PLO-nya, yang diduga kehilangan koneksi sepenuhnya dengan basis pendukungnya sejak pengasingan di Tunis.

Maka, ketika Rabin tampak bersedia bernegosiasi dengan Arafat karena ia telah belajar dari Intifada bahwa perlawanan Palestina tidak dapat diselesaikan dengan kekerasan, Arafat langsung memanfaatkan kesempatan itu. Tidak melakukan apa pun bukanlah pilihan, dan jika ia berhasil, ia akan tercatat dalam sejarah sebagai pendiri negara Palestina yang merdeka, sekecil apa pun negara itu dalam praktiknya.

1995: Pembunuhan Yitzhak Rabin

Perdana Menteri Yitzhak Rabin (1922-1995) dibunuh pada 4 November 1995 setelah berpidato di sebuah konferensi perdamaian di Tel Aviv. Pembunuh Israel tersebut langsung ditangkap, tetapi Israel kehilangan salah satu tokoh paling ikonik dalam sejarahnya yang masih muda.

Di bawah kepemimpinan Rabin, militer Israel meraih kemenangan gemilang atas negara-negara Arab tetangga selama Perang Enam Hari tahun 1967. Setelah Intifada Pertama meletus pada tahun 1987, ia bertanggung jawab untuk meredakan pemberontakan Palestina sebagai Menteri Pertahanan. Karena upaya ini tidak berhasil hanya dengan kekerasan, ia sampai pada kesimpulan bahwa negosiasi perdamaian diperlukan demi keamanan nasional Israel. Dengan pesan ini, Partai Buruh pimpinan Rabin berhasil memenangkan pemilu tahun 1992. Setahun kemudian, ia menyamai kesuksesannya di tahun 1967 dengan mencapai Kesepakatan Oslo dengan Palestina setelah pertikaian yang berlangsung selama beberapa dekade.

Kritik ultra-ortodoks dan nasionalis-ekstremis

Namun, kaum Yahudi ultra-ortodoks dan para pemukim Tepi Barat yang nasionalis-ekstremis percaya bahwa perjanjian damai ini tidak terbayangkan akan memberi Palestina pemerintahan sendiri, tidak hanya di Gaza, tetapi juga di Tepi Barat. Pada zaman Alkitab, Tepi Barat merupakan bagian penting dari Israel kuno dalam bentuk provinsi Yudea dan Samaria.

Inilah sebabnya mereka memandang Rabin sebagai pengkhianat negara bangsa Yahudi Israel. Partai Likud yang dipimpin oleh pesaing politik terpenting Rabin, Benjamin Netanyahu (1949-), sepenuhnya menganut sentimen ini: menurut mereka, pemerintahan Rabin sama sekali tidak mewakili tradisi atau nilai Yahudi. Rabin pun menyebut Netanyahu pembohong – ia merasa telah mengambil kendali penuh atas negosiasi perdamaian. Pembangunan permukiman dapat dilanjutkan dan jika ia yang menentukan, Palestina pada akhirnya hanya akan mendapatkan otonomi di 30 persen wilayah yang diduduki.

Namun, dalam atmosfer politik yang saat itu sudah tercemar, mahasiswa Thora berusia 25 tahun, Yigal Amir, yakin bahwa ia telah berbuat baik kepada negara bangsa Yahudi tersebut ketika ia mengakhiri hidup Rabin.

2000: Pertemuan puncak di Camp David (Camp David II)

Meskipun hubungan diplomatik Israel-Palestina memburuk secara nyata, 25 tahun setelah Kesepakatan Oslo menyaksikan munculnya beberapa upaya diplomatik yang bertujuan untuk menghidupkan kembali proses tersebut dari kebuntuan pasca-1995. Namun, pertemuan puncak Camp David tahun 2000 menandai dimulainya periode kekecewaan yang menegangkan.

Pada tahun 1996, terpilihnya Benjamin Netanyahu (1949-) mencerminkan kekecewaan Israel terhadap arah yang diambil Partai Buruh, terutama terkait proses perdamaian di awal 1990-an. Partai Buruh tetap berkuasa kembali pada Juni 1999 di bawah kepemimpinan Ehud Barak (1942-). Barak telah berjanji untuk menarik pasukan Israel dari Lebanon selatan, menegakkan visi Rabin dengan menyelesaikan perjanjian damai dengan Suriah, dan menegosiasikan isu-isu status permanen yang tersisa dengan Palestina.

Negosiasi Baru Israel dan Palestina

KTT Camp David berikutnya pada Juli 2000, serupa dengan Camp David I, diwarnai dengan ketegangan yang tinggi. Tugas yang dihadapi Barak dan Yasser Arafat (1929-2004) hampir lebih berat daripada tugas 22 tahun sebelumnya: menjembatani kesenjangan antara partai-partai utama terkait isu-isu status final yang belum terselesaikan, termasuk pengungsi dan hak mereka untuk kembali, Yerusalem, wilayah, perbatasan, permukiman, dan keamanan.

Camp David II berlangsung selama 15 hari, tetapi gagal mengulangi kesuksesan bersejarah yang diraih pada tahun 1978. KTT tersebut diakhiri dengan pernyataan trilateral yang hambar, ditandai dengan niat baik, namun kegagalan upaya tersebut jelas terlihat. Barak dan Arafat terpaksa kembali dari Amerika Serikat tanpa mencapai kemajuan nyata.

Intifada Kedua dan Dampaknya (2000-2005)

2000-2005: Intifada Kedua

Menjelang akhir 1990-an, semakin jelas bahwa proses perdamaian Palestina-Israel, yang dimulai dengan Kesepakatan Oslo, tidak menghasilkan solusi dua negara. Konsesi teritorial Israel tidak hanya terbatas, tetapi jumlah permukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan juga meningkat. Kekecewaan dan frustrasi di antara warga Palestina memastikan akan ada gejolak baru cepat atau lambat.

Letusan tersebut terjadi pada 28 September 2000, ketika pemimpin oposisi Israel Ariel Sharon (1928-2014) mengunjungi Masjid Al-Aqsa di Bukit Bait Suci, sebuah area yang dianggap suci oleh umat Yahudi maupun Muslim, dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian.

Serangan Palestina dan Invasi Israel

Berbeda dengan Intifada Pertama tahun 1987-1993, pemberontakan ini sejak awal diwarnai kekerasan. Kelompok oposisi Palestina seperti Hamas dan Jihad Islam telah melakukan banyak serangan terhadap Israel selama proses perdamaian, yang kini mereka gunakan kembali. Oleh karena itu, alih-alih melemparkan batu dan mengorganisir aksi kolektif, seperti yang terjadi secara luas selama Intifada Pertama oleh sebagian besar penduduk, kelompok-kelompok militer kini menentukan sifat pemberontakan. Israel merespons dengan membunuh para pemimpin terkemuka organisasi Palestina, yang menyebabkan lebih banyak pertikaian. Oleh karena itu, Intifada Kedua ditandai dengan banyak serangan Palestina dan invasi Israel.

Namun, masih ada berbagai upaya untuk mencapai gencatan senjata, seperti pada tahun 2003, yang bertepatan dengan inisiatif perdamaian baru: Peta Jalan. Namun, upaya-upaya tersebut tidak membawa hasil. Intifada Al-Aqsa baru berakhir pada tahun 2005, setelah ratusan warga Israel dan ribuan warga Palestina terbunuh, ketika berbagai kelompok militer Palestina mengumumkan masa tenang pada bulan Maret tahun itu, sebagian sebagai tanggapan atas seruan dari penduduk Palestina.

2002-: Tembok Tepi Barat dan Perluasan Permukiman Israel

Menanggapi Intifada Kedua dan mengklaim kembali adanya kekhawatiran keamanan, Israel mulai membangun tembok pemisah di Tepi Barat dan Yerusalem Timur: Tembok Tepi Barat atau Tembok Israel. Demikian pula, jumlah permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur terus meningkat.

Tembok Tepi Barat

Dengan tinggi sekitar 9 meter dan panjang sekitar 700 kilometer setelah selesai, tembok ini membentang jauh melampaui wilayah Israel sebagaimana ditetapkan oleh batas gencatan senjata tahun 1949 ('Garis Hijau'), sehingga secara ilegal mencaplok tanah Palestina di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Dengan secara fisik memisahkan warga Palestina dari Yerusalem, tembok pemisah ini juga secara visual melambangkan penutupan proses perdamaian.

Permukiman Israel di Wilayah Palestina

Perundang-undangan yang menguntungkan menyebabkan perluasan permukiman ilegal Israel di Tepi Barat dan Yerusalem Timur. Pada tahun 2024, di wilayah Palestina yang diduduki terdapat lebih dari 150 permukiman, dan sekitar 100 pos terdepan (permukiman yang tidak resmi diizinkan oleh pemerintah Israel). Dengan lebih dari 450.000 pemukim Israel yang tinggal di Tepi Barat dan 220.000 di Yerusalem Timur, prospek solusi dua negara tampaknya semakin mustahil saat ini.

2005: Mundurnya Israel dari Jalur Gaza

Setelah Intifada Kedua, Israel secara sepihak menarik diri dari Gaza pada Agustus 2005, memaksa lebih dari 8.000 pemukim ilegal pindah di tengah perlawanan yang sengit. Di tingkat internasional, banyak pihak menganggap langkah ini sebagai langkah awal menuju penarikan diri Israel yang lebih luas dan pembongkaran permukiman di Tepi Barat, sehingga memberikan momentum baru bagi proses perdamaian. Namun, mereka keliru.

Israel (sebagian) meninggalkan Gaza

Perserikatan Bangsa-Bangsa dan beberapa organisasi hak asasi manusia tetap menganggap Israel sebagai kekuatan pendudukan Jalur Gaza dan, oleh karena itu, terikat oleh kewajiban kekuatan pendudukan berdasarkan hukum kebiasaan internasional dan Konvensi Jenewa Keempat (1949).

Dalam perspektif ini, melalui rencana penarikan pasukan pada tahun 2005, Israel berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab hukum sebagai kekuatan pendudukan sambil tetap mempertahankan kendali militer yang efektif atas Gaza dan penduduknya.

Penarikan Israel juga secara luas (salah) ditafsirkan oleh banyak warga Palestina sebagai kemenangan perlawanan bersenjata selama Intifada Kedua, yang berkontribusi pada kemenangan gemilang Hamas dalam pemilihan Dewan Legislatif Palestina yang diadakan pada akhir Januari 2006.

Perang Gaza (2006-)

2006-2007: Kemenangan elektoral Hamas dan blokade Israel

Pada tahun 2006, Otoritas Nasional Palestina (PNA atau PA) menyelenggarakan pemilihan umum parlemen. Hamas, yang dikenal di luar wilayah tersebut karena aksi bom bunuh diri terhadap warga sipil Israel, memenangkan mayoritas kursi. Di tingkat internasional, hal ini mengejutkan banyak orang. Di tingkat lokal, warga Palestina tidak terlalu terkejut.

Warga Palestina juga mengenal Hamas dari kegiatan amal, bantuan sosial, dan perawatan medisnya. Selain itu, organisasi tersebut menggelar kampanye pemilu yang cerdik, yang tidak hanya menunjukkan bahwa Hamas adalah kelompok yang kompeten, tetapi juga mengecam kebijakan korup PNA. Dalam hal ini, kemenangan Hamas dalam pemilu tidaklah terlalu mengejutkan.

Komunitas internasional menghentikan kerja sama

Namun bagi Israel, Amerika Serikat, dan Uni Eropa, kemenangan Hamas dalam pemilu merupakan alasan untuk berhenti bekerja sama dengan PNA, yang kini dipimpin oleh Hamas, hingga organisasi tersebut mengakui Israel dan mengecam kekerasan. Karena Hamas—dengan alasan pendudukan Israel yang masih berlanjut—menolak untuk melakukannya, komunitas internasional mencoba mencari mitra perdamaian dalam kepemimpinan Palestina lama yang telah kalah dalam pemilu. Bagi Hamas, ini merupakan tamparan yang tidak demokratis.

Hamas Kuasai Gaza, Otoritas Nasional Palestina di Tepi Barat

Ketika para pemimpin Palestina yang berkuasa juga tidak menerima Hamas, konflik bersenjata pun terjadi yang mengakibatkan Hamas menguasai Jalur Gaza dan kepemimpinan PNA yang lama mempertahankan kekuasaannya di Tepi Barat. Sejak saat itu, kekuasaan Hamas menjadi alasan bagi beberapa negara Barat untuk memboikot Gaza.

Blokade Israel

Untuk alasan yang sama, Israel menutup Gaza dengan blokade yang bertujuan untuk memaksa Hamas bertekuk lutut. Makanan, listrik, dan bahan bakar hanya diizinkan masuk ke wilayah tersebut dalam batas terbatas. Meskipun Israel telah melonggarkan blokade beberapa kali, hal itu berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, ekonomi, dan lapangan kerja di Jalur Gaza. Lebih lanjut, Hamas masih berkuasa di wilayah tersebut hingga saat ini.

2008-2014: Perang Gaza

Perang Gaza (2008-2014) merujuk pada serangkaian tiga konfrontasi militer antara Israel dan kelompok militer Palestina yang berbasis di Jalur Gaza, terutama Hamas.

Perang Gaza 2008

Rangkaian perang dimulai pada 27 Desember 2008, ketika Israel melancarkan Operasi Cast Lead sebagai respons atas meningkatnya serangan roket oleh Hamas dan kelompok militer lainnya dari Gaza ke wilayah Israel. Pasukan Israel melancarkan operasi militer berskala besar, termasuk serangan udara dan invasi darat, yang menargetkan infrastruktur dan militer Hamas.

Konflik yang berlangsung selama tiga minggu tersebut mengakibatkan korban jiwa yang signifikan, baik di kalangan warga sipil Palestina maupun militer, serta kerusakan infrastruktur di Gaza. Konflik ini berakhir dengan gencatan senjata yang ditengahi oleh Mesir pada 18 Januari 2009. Israel mengklaim telah mencapai tujuannya untuk mengurangi tembakan roket dari Gaza, sementara Hamas menyatakan kemenangan moral karena melawan militer Israel.

Perang Gaza 2012

Namun, konflik kembali meletus pada November 2012, ketika Israel melancarkan Operasi Pilar Pertahanan sebagai respons atas serangan roket oleh militer Palestina dari Gaza. Militer Israel melakukan serangan udara yang menargetkan infrastruktur dan para pemimpin Hamas, termasuk pembunuhan komandan militer Hamas, Ahmed Jabari (1960-2012).

Konflik tersebut berlangsung selama delapan hari dan mengakibatkan korban jiwa di kedua belah pihak, termasuk kematian warga sipil dan kerusakan infrastruktur yang signifikan di Gaza. Gencatan senjata kedua yang ditengahi oleh Mesir dan Amerika Serikat dicapai pada 21 November 2012, yang untuk sementara mengakhiri permusuhan.

Perang Gaza 2014

Perang terakhir periode ini dimulai pada Juli 2014, menyusul eskalasi permusuhan antara Israel dan Hamas, yang dipicu oleh penculikan dan pembunuhan tiga remaja Israel dan pembunuhan balasan terhadap seorang remaja Palestina. Israel melancarkan Operasi Protective Edge, sebuah operasi militer skala besar yang bertujuan untuk menghentikan tembakan roket dari Gaza dan menghancurkan terowongan Hamas yang digunakan untuk infiltrasi ke wilayah Israel.

Setelah 50 hari, konflik berakhir dengan gencatan senjata ketiga yang ditengahi oleh Mesir pada 26 Agustus 2014. Gencatan senjata tersebut melibatkan serangan udara intensif oleh Israel, serangan darat ke Gaza, dan serangan roket oleh militer Palestina yang menargetkan kota-kota Israel. Perang tersebut mengakibatkan banyak korban jiwa, dengan lebih dari 2.100 warga Palestina tewas (kebanyakan warga sipil) dan kerusakan infrastruktur yang signifikan di Gaza. Di pihak Israel, 67 tentara dan 6 warga sipil tewas.

2023-: Perang Gaza Baru

Pada hari Sabtu, 7 Oktober 2023, gerakan Palestina Hamas melancarkan serangan besar-besaran dan brutal terhadap Israel, yang mengakibatkan lebih dari 250 sandera dan 1.100 orang tewas. Israel merespons dengan keras melalui pemboman tanpa henti dan invasi yang merusak, yang merenggut nyawa puluhan ribu warga sipil. Solusi untuk konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun tampaknya belum terlihat.

Mahkamah Pidana Internasional dan Mahkamah Internasional

Di tingkat internasional, perang Gaza yang baru ini telah mengguncang sentimen secara signifikan. Pada Mei 2024, Mahkamah Pidana Internasional (ICC) di Den Haag mengeluarkan surat perintah penangkapan untuk Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu (1949-), Menteri Pertahanan Israel,

dan beberapa tokoh senior Hamas atas dugaan kejahatan terhadap kemanusiaan pada dan setelah 7 Oktober 2023. Mahkamah lainnya di Den Haag – Mahkamah Internasional (ICJ) – telah memerintahkan Israel untuk mengambil semua langkah guna mencegah tindakan apa pun yang bertentangan dengan Konvensi Genosida 1948.

Israel berperang dengan Hamas: apa yang terjadi dan apa yang akan terjadi selanjutnya?

Penjelasan Konflik Israel-Palestina: Ini mendahului Perang Gaza

Linimasa | Perang Gaza saat ini didahului oleh periode lebih dari seratus tahun pergolakan dan konfrontasi. Periode ini dikenal sebagai konflik Israel-Palestina. Melalui linimasa, lima cendekian memberikan penjelasan langkah demi langkah tentang pertempuran yang telah berlangsung puluhan tahun ini.

Serangan Hamas terhadap Israel

Hamas adalah organisasi Sunni-Islam dan Jihadi yang tidak menjauhi terorisme, Malcontent menjelaskan dalam EenVandaag (10 Oktober 2023). "Hampir semua organisasi dan pemerintah internasional memasukkan mereka ke dalam daftar organisasi teroris." Namun Hamas lebih dari itu, tegasnya. Selain organisasi teroris, Hamas juga merupakan partai politik yang berpartisipasi dalam pemilihan umum (demokratis) Palestina pada tahun 2006 dan menang. Selain itu, Hamas juga menyediakan layanan sosial bagi basis pendukungnya. Organisasi ini dalam banyak hal dapat dibandingkan dengan Hizbullah di Lebanon, meskipun organisasi tersebut mendukung versi Syiah dari Islam.

Dari Jalur Gaza, Hamas melancarkan serangan besar-besaran dan berdarah terhadap Israel pada hari Sabtu, 7 Oktober 2023. Hamas menembakkan ribuan roket ke kota-kota Israel dan para pejuang Hamas, yang menerobos pagar perbatasan, membunuh sekitar 1.200 warga sipil dan tentara Israel. Lebih lanjut, mereka membawa lebih dari 200 orang ke Gaza sebagai sandera. "Belum pernah sebelumnya pejuang Hamas berada di wilayah Israel dalam jumlah [besar] seperti ini," kata Malcontent di Trouw (7 Oktober 2023).

Ketegangan internal di Israel

Malcontent meyakini bahwa waktunya bukanlah kebetulan. "Saya pikir Hamas menyadari betul bahwa Israel telah sangat sibuk dengan dirinya sendiri selama ini," (Trouw, 7 Oktober 2023). Sejak pembentukan pemerintahan ultra-kanan baru pada Desember 2022, Israel telah dirundung ketegangan internal yang besar. Misalnya, ratusan ribu warga Israel telah turun ke jalan setiap minggu dalam enam bulan terakhir untuk memprotes pemerintahan Perdana Menteri Benjamin 'Bibi' Netanyahu, yang ingin membatasi demokrasi dengan penerapan undang-undang baru.

Pemerintah juga mendukung para pemukim Israel di Tepi Barat yang diduduki. Karena kekerasan antara warga Palestina dan pemukim di sana meningkat tajam, militer Israel – Pasukan Pertahanan Israel (IDF) – telah merelokasi pasukan di dekat perbatasan Gaza ke Tepi Barat. "Semua orang saling memandang, semua orang sering berdiskusi, sehingga sisi operasional masalah ini mungkin tidak sepenuhnya terorganisir. Hamas dapat memanfaatkan hal itu untuk keuntungannya," kata Malcontent.



Harapan Hamas

Eskalasi kekerasan besar terakhir dalam konflik Israel-Palestina terjadi pada tahun 2021. Eskalasi tersebut berlangsung selama dua minggu pada saat itu dan kekerasan kembali berkobar beberapa kali setelahnya. "Keunggulan militer Israel tentu saja merupakan fakta," kata Malcontent dalam Trouw (7 Oktober 2023). Semua perang di Gaza sejak 2006 selalu berakhir dengan keuntungan bagi Israel. "Hamas tahu mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan Israel."

Namun, Hamas tidak melancarkan serangan baru ini dengan sia-sia, pikir Malcontent. "Mereka menggunakan untuk menunjukkan bahwa mereka masih ada, bahwa mereka masih kuat." Selain itu, ia yakin Hamas berharap untuk menyabotase hubungan antara Israel dan Arab Saudi. Hamas konon ingin memaksa negara-negara Arab untuk terus mendukung Palestina. Iran, yang mendukung Hamas baik secara militer maupun finansial, juga tidak antusias dengan hubungan yang lebih baik antara Arab Saudi dan Israel. Iran menganggap Israel sebagai musuh bebuyutannya dan Saudi yang beraliran Sunni sebagai pesaing regional yang penting.

Hamas juga diduga berharap percikan perang ini akan mencapai Tepi Barat dan memicu intifada (pemberontakan) Palestina baru di sana. Lebih lanjut, ada kemungkinan Hamas mengharapkan bantuan dari gerakan Hizbullah di Lebanon, yang juga didukung oleh Iran dan dapat memobilisasi puluhan ribu pejuang untuk menyerang Israel dari utara.

Israel kini menghadapi dilema, kata Malcontent dalam Met het Oog op Morgen (7 Oktober 2023). Serangan darat diperlukan untuk mengalahkan Hamas; pemboman saja tidak akan berhasil. Pemerintah juga membutuhkan sesuatu untuk memuaskan hasrat akan keadilan dan pembalasan di

antara penduduknya sendiri. Namun, serangan darat semacam itu dapat membakar seluruh wilayah, termasuk Israel.

Blokade Jalur Gaza

Pada 9 Oktober, tersiar kabar bahwa ratusan jenazah pengunjung festival yang tewas ditemukan di dalam dan di sekitar lapangan festival dekat kibbutz Re'im, dan Hamas menyandera lebih dari dua ratus orang. Kemudian pada hari yang sama, pemerintah Israel mengumumkan blokade yang memutus akses sepenuhnya ke Jalur Gaza dari air, listrik, bahan bakar, dan barang-barang lainnya. 24 jam kemudian, keran air dibuka kembali.

Blokade ini terutama akan merugikan warga sipil tak berdosa di Gaza, tulis Malcontent di RTL Nieuws (9 Oktober 2023). "Sejak 2007, terjadi kelangkaan berbagai macam barang di Gaza. Keadaan ini akan semakin parah sekarang."